

KERTAS KERJA ANALISIS KESELARASAN AKTIVITAS DALAM SUB KEGIATAN (DPA)

Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Target kinerja	Aktivitas Utama Dalam DPA	Analisis dan Dukungan	Keselaran
1	2		3	4	5	6	7
URUSAN KEUANGAN							
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah				
	i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai peraturan				
	1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Laporan	Membuat Laporan Peta Resiko, SPIP, PUG, IPKD, RB, Paparan Komisi, PK, LKJiP, Renja Induk , Renja Perubahan, KUA PPAS, KUA PPASP, Buku RKA, Buku Perubahan RKA dan Buku Revisi RKAP Perkada, Buku DPA, Buku DPPA, Buku Revisi DPPA Perkada, Laporan Konsolidasi Program dan Kegiatan per bulan, Laporan Monev Perbidang, Laporan LPPD, LKPJ (Realisasi dan Tanggapan DPRD), Laporan Perjanjian Kinerja, Laporan Renaksi	Tanpa pelaksanaan sub-kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sistematis, instansi hanya akan melakukan perencanaan tanpa tahu dampaknya. Hal ini sangat berpengaruh pada nilai SAKIP karena dianggap tidak memiliki fungsi pengendalian internal.	Mendukung (100%)
	ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun sesuai dengan peraturan				
	2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	172 Orang/Bulan	Penghitungan berkala, pengujian daftar gaji, penerbitan SPM Gaji, dan rekonsiliasi iuran wajib pegawai.	Sangat Mendukung. Pemenuhan hak finansial aparatur merupakan prasyarat mutlak agar seluruh operasional organisasi berjalan lancar tanpa hambatan motivasi.	Mendukung (100%)

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Target kinerja	Aktivitas Utama Dalam DPA	Analisis dan Dukungan	Keselaran
	3 Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	Melakukan penelitian keabsahan, kelengkapan, dan pengujian kebenaran materiil atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh bendahara pengeluaran atau pihak ketiga.	Sangat Mendukung. Merupakan hal utama instansi dalam menegakkan prinsip akuntabilitas, validitas, dan kepatuhan hukum atas pemanfaatan belanja daerah. Pelaksanaan fungsi verifikasi ini untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran kas daerah telah didasarkan pada pengujian administratif dan substantif yang sah, objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Mendukung (100%)
	4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	27 Laporan	Menyusun komponen laporan keuangan akhir tahun yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca SKPD, dan Laporan Prognosis belanja. Melakukan verifikasi data pengadaan yang bersumber dari belanja modal, penetapan status penggunaan aset baru, pemrosesan dokumen alih status, hingga pelaksanaan penghapusan barang rusak berat agar saldo akun di neraca mencerminkan nilai wajar riil	Sangat Mendukung. Jika sub-kegiatan ini ditiadakan, perangkat daerah secara otomatis akan mengalami gagal-lapor keuangan, yang berimplikasi langsung pada sanksi administratif dan hukum.	Mendukung (100%)
	<i>iii Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang terpenuhi</i>				
	5 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Penyediaan Sewa Safety Box	Sangat Mendukung. Tanpa pengawasan dari sub-kegiatan ini, instansi akan mengalami tata kelola yang tidak baik yang berujung pada hilangnya rekam jejak kepemilikan daerah. Oleh karena itu, seluruh alokasi belanja modal pengamanan, volume target, dan operasional pelacakan aset di dalam DPA	Mendukung (100%)
	<i>iv Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan</i>				

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Target kinerja	Aktivitas Utama Dalam DPA	Analisis dan Dukungan	Keselaran
	6	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	28 Dokumen	Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Anjab, ABK, Evjab, Penataan Arsip Dinamis)	Sangat Mendukung. Penyerapan anggaran DPA berbanding lurus dengan peningkatan kinerja nyata pegawai serta pencapaian target strategis organisasi	Mendukung (100%)
	7	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Sangat Mendukung. Peningkatan kapasitas, kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural aparatur sipil negara (ASN) agar selaras dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) organisasi.	Mendukung (100%)
	v	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi umum perangkat daerah dengan baik				
	8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Penggantian lampu redup/mati di area kerja dan penerangan luar gedung, Pemeliharaan instalasi (Gedung Kantor, 1 Gedung Gudang Arsip, 2 Rumah Dinas)	Sangat Mendukung. Sebagai penyedia daya dan fasilitas paling mendasar bagi berjalannya seluruh aktivitas perkantoran. Tanpa adanya pasokan listrik dan penerangan yang stabil serta aman, seluruh sistem kerja digital, operasional komputer, AC, dan pelayanan administrasi perangkat daerah akan lumpuh total.	Mendukung (100%)
	9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Pengadaan kertas (HVS) dan tinta printer untuk pencetakan dokumen dinas, Penyediaan lemari arsip (filing cabinet) dan map ordner penataan berkas, Penyediaan meja dan kursi kerja pegawai yang layak.	Sangat Mendukung. Peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai (terutama ATK dan tinta), seluruh proses surat-menyurat formal, pencetakan dokumen penganggaran, penggandaan bukti transaksi, hingga pengarsipan fisik berkas pertanggungjawaban akan terhambat.	Mendukung (100%)
	10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Menyediakan sarana habis pakai vital kantor, mulai dari alat tulis kantor (ATK), tinta printer, dokumen administrasi formal, logistik kebersihan gedung, hingga pemenuhan kebutuhan untuk tamu dinas.	Sangat Mendukung. Menjamin Keberlangsungan Pelayanan Publik. Tanpa aktivitas ini, seluruh program prioritas dinas akan lumpuh karena tidak ada dukungan sarana dan prasarana dasar	Mendukung (100%)

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Target kinerja	Aktivitas Utama Dalam DPA	Analisis dan Dukungan	Keselaran
	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Pengadaan map arsip berlogo instansi, amplop dinas resmi ber-kop surat, buku agenda disposisi, bloknot rapat koordinasi,	Sangat Mendukung. Memiliki peran vital dalam menjamin kelancaran arus informasi administrasi, legalitas hukum, dan fungsi pelaporan di instansi pemerintah daerah. Tanpa alokasi anggaran yang memadai pada sub-kegiatan ini, OPD akan mengalami hambatan serius dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya.	Mendukung (100%)
	12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara) : peraturan pemerintah, permendagri, maupun perda/perkada komprehensif sebagai acuan kerja operasional bidang.	Sangat Mendukung. pemenuhan kebutuhan referensi hukum, literasi tata kelola pemerintahan, informasi publik terkini, serta buku-buku teknis akademis guna meningkatkan wawasan dan menjaga akurasi pengambilan kebijakan oleh para aparatur sipil negara (ASN).	Mendukung (100%)
	13	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sangat Mendukung. Penyediaan pelayanan keprotokolan, akomodasi, konsumsi, dan transportasi bagi tamu kedinasan (baik dari pemerintah pusat, kementerian/lembaga, pemerintah daerah lain guna menjaga hubungan kerja sama antar-lembaga dan citra positif daerah	Mendukung (100%)
	14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400 Laporan	Perjalanan dinas konsultasi penerapan regulasi terbaru ke Kemendagri/Kemenkeu dan koordinasi teknis antar daerah.	Sangat Mendukung. Memastikan implementasi kebijakan pengelolaan keuangan di daerah tidak melanggar aturan hukum nasional yang dinamis.	Mendukung (100%)
	15	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	8 Dokumen	Aplikasi : IG BPKAD, SIPD RI, PPID, e-Sumsel, e BKBK, Web Sekretariat, e-BMD, Lapor SP4N)	Saluran resmi instansi. Penting sebagai pusat informasi utama, publikasi regulasi daerah, pengumuman resmi, dan dokumentasi kinerja BPKAD.	Mendukung (100%)
	vi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kebutuhan				

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Target kinerja	Aktivitas Utama Dalam DPA	Analisis dan Dukungan	Keselaran
	16	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	Pengadaan Mebel	Sangat Mendukung. Penyediaan fasilitas sarana prasarana fisik berupa furnitur kantor untuk mendukung kinerja aparatur, kenyamanan pelayanan publik	Mendukung (100%)
	17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	38 Unit	38 Unit (36 Rumah Dinas Lanud, 1 Pager Wisma Yogyakarta, 1 Pagar Wisma Bandung)	Sangat Mendukung. Berdasarkan MOU yang disepakati dengan pihak terkait	Mendukung (100%)
	vii	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah				
	18	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Pembelian meterai tempel (Meterai Rp10.000) untuk keabsahan surat perjanjian, kuitansi bernilai besar, dan dokumen pertanggungjawaban keuangan, Belanja Jasa Pengiriman	Sangat Mendukung. Menjamin kelancaran arus keluar-masuk surat dinas, distribusi dokumen formal, pengiriman paket logistik dinas, serta pemenuhan legalitas korespondensi lembaga pemerintahan	Mendukung (100%)
	19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	Pembayaran tagihan telepon, Pembayaran tagihan telepon dan tagihan air	Sangat Mendukung. Merupakan komponen vital dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Sub-kegiatan ini bersifat wajib dan rutin guna memastikan fasilitas utilitas dasar kantor tetap menyala dan berfungsi tanpa gangguan untuk mendukung pelayanan publik	Mendukung (100%)
	20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	Pembayaran Jasa Keamanan, Instruktur Senam, Tenaga Kebersihan	Sangat Mendukung. Merupakan pilar utama dalam menjaga kebersihan, keamanan, kenyamanan.	Mendukung (100%)
	viii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	100			

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Target kinerja	Aktivitas Utama Dalam DPA	Analisis dan Dukungan	Keselaran
	21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	Pemeliharaan Kendaraan Dinas untuk 5 Unit untuk 5 Orang Esselon 3 dan 1 Unit untuk 1 Orang Esselon 1	Sangat Mendukung. Untuk menjaga keselamatan, serta legalitas hukum kendaraan bermotor yang melekat pada para pejabat struktural guna mendukung kelancaran mobilitas kedinasan mereka.	Mendukung (100%)
	22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sangat Mendukung. Agar Kendaraan Dinas Operasional tetap dalam kondisi prima, aman, dan sah secara hukum demi kelancaran pelayanan langsung kepada masyarakat.	Mendukung (100%)
	23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor - Kendaraan Dinas Operasional, Belanja Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Operasional	Sangat Mendukung. Kepatuhan Hukum & Audit Keuangan yaitu Menjaga nilai ekonomis aset tetap berada dalam kondisi "Baik". Hal ini sangat penting untuk mencegah penurunan nilai aset yang drastis yang dapat menjadi catatan negatif saat audit LKPD oleh BPK RI.	Mendukung (100%)
	24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Pemeliharaan Gedung Kantor	Merupakan komponen vital dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Sub-kegiatan ini difokuskan pada perawatan, perbaikan, dan pemulihan kondisi fisik infrastruktur gedung milik daerah agar tetap aman, nyaman, dan layak pakai guna mendukung pelayanan publik yang optimal.	Mendukung (100%)
II	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Persentase Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Anggaran, Tata Kelola Perbendaharaan dan Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan				
	<i>i</i>	<i>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</i>	<i>Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Anggaran daerah dalam pemenuhan belanja daerah urusan Pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta belanja Mandatory spending</i>				

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Target kinerja	Aktivitas Utama Dalam DPA	Analisis dan Dukungan	Keselaran
	25	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	4 Dokumen	Fasilitasi rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sinkronisasi target pendapatan, dan pembahasan bersama Banggar DPRD.	Sangat Mendukung. Sub Kegiatan ini merupakan Fondasi awal dalam siklus pengelolaan keuangan daerah yang krusial untuk mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Dokumen ini memastikan perencanaan anggaran selaras dengan aturan, realistis, dan transparan. KUA-PPAS disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berpedoman pada RPJMD. Proses koordinasi yang baik memastikan tidak ada program fiktif atau kegiatan yang tidak didukung dokumen perencanaan. PPAS memberikan batas maksimal anggaran untuk setiap kegiatan, mencegah "pemborosan" atau penganggaran yang tidak terukur yang sering menjadi temuan BPK.	Mendukung (100%)
	26	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	34 Dokumen	Penyusunan Dokumen Raperda, Perda, Rapergub, Pergub, Revisi Pergub, Pemandangan Fraksi, Jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Fraksi, Pidato Pengantar KUA PPAS, Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara Pimpinan DPRD dan Gubernur Sumatera Selatan, Pengantar Pidato Nota Keuangan, Pengantar Nota Keuangan, Nota Keuangan, Risalah APBD, Pidato Pendapat Akhir, Pidato Pengantar APBD, Surat Edaran Penyusunan APBD, Matrik APBD) Induk 2027 dan Perubahan 2026	Sangat Mendukung. Merupakan hal utama dalam mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). BPK menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Jika Perda APBD dan Perkada Penjabaran ditetapkan tepat waktu (sebelum 31 Desember), hal ini menunjukkan tata kelola keuangan yang disiplin.	Mendukung (100%)
	27	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		Dokumen Regulasi yang terkait Pengelolaan Keuangan seperti Dokumen ASB, SSH, Pedoman Penyusunan APBD	Sangat Mendukung. Merupakan fondasi hukum (regulasi) yang memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan daerah memiliki standar yang baku dan sesuai dengan aturan terbaru. BPK akan memberikan opini buruk jika daerah masih menggunakan acuan hukum yang sudah kadaluwarsa, karena hal ini menyebabkan kesalahan dalam pengakuan dan pengukuran transaksi keuangan.	Mendukung (100%)

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Target kinerja	Aktivitas Utama Dalam DPA	Analisis dan Dukungan	Keselaran
	ii	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemerintah daerah kabupaten/kota yang dibina pengelolaannya				
	28	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	34	Melaksanakan Evaluasi APBD Induk dan Perubahan Kabupaten/Kota, Penerbitan SK Evaluasi	Sangat Mendukung. Kewajiban Konstitusi (Perpanjangan Tangan Pusat). Jika Raperda Perubahan APBD Kabupaten/Kota tidak dievaluasi oleh Provinsi, draf tersebut tidak dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Keterlambatan penetapan APBD akan memicu sanksi dari Kementerian Keuangan, yaitu penundaan atau pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dapat merugikan pembangunan di kabupaten/kota tersebut.	Mendukung (100%)
	29	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	18	Melaksanakan Evaluasi Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota, Penerbitan SK Evaluasi	Sangat Mendukung. Kewajiban Konstitusi (Perpanjangan Tangan Pusat). Evaluasi ini memastikan bahwa angka pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang tertuang dalam Raperda Pertanggungjawaban 100% sama (sinkron) dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.	Mendukung (100%)
	iii	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah, Pengelolaan Dana Perimbangan secara Akuntabel efektif dan efisien serta berbasis digitalisasi	100			

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Target kinerja	Aktivitas Utama Dalam DPA	Analisis dan Dukungan	Keselaran
	30	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	44 Dokumen	Membuat Laporan Buku Kas Umum, Restricted Cash, Rekonsiliasi Bank, DAU, DAK, DID, TDF	Sebagai bendahara umum daerah, BPKAD memverifikasi bahwa setiap pengeluaran kas (penerbitan SP2D) didasarkan pada dokumen pendukung yang lengkap dan sah, serta untuk memastikan bahwa Kas di Kas Daerah yang disajikan dalam Neraca adalah nyata, akurat nilainya, dan dimiliki secara sah oleh pemerintah daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).	Mendukung (100%)
	31	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	179 Dokumen	Melakukan Rekon Pajak, Rekon BPJS dan Rekon Taspen, Transaksi Laporan Non Tunai, Kas Bank, KKPD	Sangat Mendukung. Sub-kegiatan ini merupakan salah satu prosedur pengendalian intern (SPI) paling penting di BPKAD untuk memastikan laporan keuangan daerah bebas dari salah saji material. Opini WTP sangat bergantung pada kekuatan SPI. Semakin rutin rekonsiliasi dilakukan, semakin kecil risiko kecurangan (fraud) atau kehilangan uang daerah yang tidak terdeteksi.	Mendukung (100%)
	iv	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan SAP, dan Ketepatan Waktu Dalam Penetapan Perda tentang Pelaksanaan Pertanggung jawaban APBD				

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Target kinerja	Aktivitas Utama Dalam DPA	Analisis dan Dukungan	Keselaran
	32	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	17 Dokumen	Membuat BA Rekon Pajak, Retribusi, Pendapatan Lainnya, Transfer, Belanja Daerah, Laporan STS dan SP2D	Sangat Mendukung. Sub kegiatan ini adalah penentu utama apakah laporan keuangan layak menyandang opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Sub kegiatan ini juga untuk menghindari ketidaksinkronan data antar-laporan yang sering menjadi temuan audit. Rekonsiliasi memastikan seluruh laporan menyajikan angka yang logis dan saling terhubung. BPK memerlukan penjelasan memadai atas setiap kenaikan atau penurunan akun yang signifikan. Verifikasi yang kuat memberikan basis data yang valid untuk narasi di CaLK.	Mendukung (100%)
	33	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	14 Dokumen	Membuat Laporan Raperda dan Perda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rapergub tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Provinsi, BLUD Provinsi yang dibina, Laporan Keuangan Konsolidasi Pemerintah Provinsi, Laporan Hasil Pemeriksaan	Sangat Mendukung. Dalam siklus akuntansi daerah, sub-kegiatan ini merupakan akhir dari seluruh proses pelaporan keuangan dalam satu tahun anggaran. Keberhasilan penyusunan Raperda Pertanggungjawaban ini adalah penentu apakah opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang diberikan BPK dapat dipertahankan. Sub kegiatan ini adalah proses formalisasi hukum atas laporan keuangan yang telah diaudit. Jika BPKAD mampu menyusun draf regulasi ini dengan akurat, tepat waktu, dan selaras dengan hasil audit BPK, maka opini WTP akan terjaga secara administratif dan hukum.	Mendukung (100%)
	v	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan kewenangan Pengelolaan keuangan daerah				
	34	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	34 Laporan	Membuat Laporan, Penerbitan SPM dan SP2D	Berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah	
	35	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	4 Laporan	Membuat Laporan, Penerbitan SPM dan SP2D	Menjadi instrumen pengaman fiskal daerah. Aktivitas ini memastikan pemerintah daerah memiliki respons tinggi dalam mengatasi bencana tak terduga tanpa melanggar prosedur anggaran.	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Target kinerja	Aktivitas Utama Dalam DPA	Analisis dan Dukungan	Keselaran
	36	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	18 Laporan	Membuat Laporan, Penerbitan SPM dan SP2D	Berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah	
III	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah				
	<i>i</i>	<i>Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>	<i>Persentase Terwujudnya Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD, Penatausahaan BMD, Pemanfaatan dan Pemindatangan BMD, Inventarisasi, Penertiban dan Laporan Belanja Modal yang Akuntabel</i>				
	37	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	4	Survei pasar terstruktur dan komparasi katalog harga, Penyusunan instrumen batas pagu biaya aktivitas (SBU). Aktivitas ini mencakup perumusan, penghitungan, dan legalisasi batas atas harga barang/jasa sebagai acuan wajib bagi seluruh SKPD dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).	Sangat Mendukung. anpa adanya alokasi anggaran dan operasional untuk menyusun standar harga, pemerintah daerah akan kehilangan alat ukur kewajaran belanja. Setiap OPD akan mengusulkan harga barang/jasa secara sepihak dan subjektif pada RKA mereka, yang dipastikan akan memicu pembengkakan nilai APBD serta memicu temuan material pemborosan keuangan negara oleh BPK RI	Mendukung (100%)
	38	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	61 Laporan	Rekonsiliasi data fisik barang, Penyusunan Inventaris dan draf Neraca Aset Tetap, SK Penetapan Belanja Modal, SK Penghapusan Belanja Modal, SK alih Status Belanja Modal, SK Penetapan Status Aset, Laporan Rutin dan Laporan BOS, Laporan Barang Milik Daerah Audited dan Unaudited, Catatan atas Laporan Keuangan	Sangat Mendukung. Tanpa adanya alokasi anggaran penatausahaan yang memadai dalam DPA, pemerintah daerah akan mengalami kesulitan dalam pelacakan aset. Mutasi barang yang tidak tercatat, barang rusak terbiarkan tanpa penyusutan di sistem, atau peralatan dinas tanpa label kodifikasi akan langsung menciptakan risiko tinggi terjadinya Salah Saji Material pada laporan keuangan daerah. Mengingat BPK RI menaruh perhatian paling besar pada validitas saldo aset tetap, kelalaian data pada sub-kegiatan ini dipastikan akan langsung menggugurkan status Opini WTP daerah	Mendukung (100%)

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Target kinerja	Aktivitas Utama Dalam DPA	Analisis dan Dukungan	Keselaran
39	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	76 Laporan	Sertifikasi Tanah Milik Pemprov. Sumsel dan Pengawasan Pengendalian Pengelolaan BMD). Rapat Koordinasi, Verifikasi Lapangan dengan Instansi Vertikal/Aparat Penegak Hukum, Pengurusan Sidang Sengketa Aset	Sangat Mendukung. Tanpa adanya alokasi anggaran pengawasan dalam DPA, instansi akan mengalami tata kelola yang lemah. Hal ini berpotensi memicu terjadinya kehilangan aset fisik secara tidak terkendali, penyalahgunaan pemanfaatan oleh pihak yang tidak berhak, serta memicu sengketa hukum yang berujung pada gugatan ganti rugi terhadap APBD. Pengendalian yang lemah pada sub-kegiatan ini dipastikan akan memicu temuan material oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang dapat menggugurkan Opini WTP daerah	Mendukung (100%)
40	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	60 Dokumen	Pemusnahan fisik barang rusak berat dan penerbitan SK Penghapusan Aset, verifikasi Lapangan dengan Instansi Vertikal/Aparat Penegak Hukum, Pengurusan Sidang Sengketa Aset, Penertiban Aset	Sangat Mendukung. Tanpa adanya Sub Kegiatan ini maka Neraca Keuangan daerah akan menyajikan data yang tidak benar karena barang-barang rusak berat dan hilang akan tetap tercatat sebagai aset bernilai tinggi. Hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan menjadi pemicu utama munculnya temuan material oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI	Mendukung (100%)
Jumlah : 40 sub kegiatan						

Palembang, Januari 2026
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sumatera Selatan,



H. Yossi Hervandi, S.E., M.M., CGAA
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 198208162001121004